BAB 1
PENDAHULUAN

Kantor Pos hingga sekarang ini merupakan potensi sosial ekonomi kota yang perlu dikembangkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kota melalui aktivitas pengiriman dokumen, uang, dan barang. Dikaitkan dengan program pengembangan pariwisata, keberadaan kantor pos memiliki peluang untuk memberikan kontribusi yang sangat berarti. Produk-produk untuk pengiriman yang cepat dan aman dapat memberikan kemudahan bagi para wisatawan untuk tidak perlu bersusahpayah membawa barang sendiri.

Di tengah-tengah persaingan jasa pengiriman maupun perbankan, terbukti masyarakat masih membutuhkan pelayanan pos untuk berbagai keperluan. Kebutuhan ini semakin meningkat bilamana kantor pos dapat melayani berbagai permintaan pengiriman barang-barang souvenir yang memiliki nilai ekonomi tinggi hasil produksi industri. Terlebih di era *digital marketing*, di mana jarak antara pembeli dan penjual tidak lagi terbatasi, pelayanan kantor pos menjadi sarana yang sangat diandalkan. Kantor Pos dapat berperan sebagai mediator yang tidak hanya sekedar melayani pengiriman yang handal melainkan sebagai "pemberi jasa memilih produk yang berkualitas". Betapa tidak, pengguna *digital marketing* sangat mengandalkan "kesungguhan penjual memberikan produk yang berkualitas". Di sini peran kantor pos dapat menjadi surveyor sekaligus penjamin produk yang berkualitas.

Menurut PT. Pos Indonesia, keberadaan Kantor Pos Indonesia pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746. Tujuannya untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dan pergi ke Negeri Belanda. Empat tahun kemudian didirikan kantor pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua kota tersebut. Kedua jalur tersebut menghubungkan kota Karawang, Cirebon, dan Pekalongan.

Pada era Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1808-1811, dibangunlah jalur *de groote postweg* yang menghubungkan Anyer-Panarukan. Jalur sepanjang 1.000 kilometer di pesisir utara Jawa (Pratiwo, 2002).

Jalan Raya Pos awalnya dibangun untuk pertahanan militer Belanda pada masa itu dan memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai Daendels. Jalan ini juga memperpendek waktu tempuh perjalanan darat

dari Surabaya ke Batavia yang sebelumnya ditempuh 40 hari bisa dipersingkat menjadi tujuh hari. Kini kota-kota yang dilaluinya memang akhirnya berkembang secara ekonomi (Pratiwo, 2002) (Rukayah et al, 2015). Sisi gelap yang jarang diungkap secara arsitektur dan tata kota yang memang ada misalnya hilangnya identitas alun-alun sebagai pusat kota tradisional seperti di Semarang dan Demak. (Rukayah dan Malik, 2012)

Sejak jalur tersebut dibangun, praktis pembangunan kantor pos menjadi penanda kota-kota yang dilaluinya. Kini setelah hampir 2 abad lebih, keberadaan kantor pos yang kala itu menjadi sebuah tanda kota, kini menjadi sebuah bangunan yang layak untuk dilindungi. Karakter arsitektur yang khas mewakili jamannya dan menjadi bangunan yang langka merupakan bangunan cagar budaya yang layak untuk dilindungi (Centre, 2002).

Tujuan penulisan buku ini adalah sebagai upaya perlindungan terhadap benda yang sudah dikategorikan sebagai cagar budaya. Tujuan jangka panjang adalah melakukan pendataan dan inventarisir seluruh bangunan kantor pos di sepanjang jalur *postweg* di pulau Jawa bahkan yang ada di luar pulau Jawa. Manfaat dari penulisan buku ini adalah sebagai alat inventarisir PT. Pos Indonesia guna menjadikannya sebagai bangunan cagar budaya yang memiliki nilai untuk dikembangkan sesuai dengan fungsi baru dalam menghadapi perkembangan jaman.